

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi ekonomi dan reformasi domestik telah menempatkan China pada jalur yang ditandai dengan tingkat pertumbuhan tahunan yang bervariasi antara 8 dan 10 persen, dan arus masuk investasi asing langsung tahunan rata-rata mencapai \$35-50 miliar selama dekade terakhir. Perubahan ukuran ekonomi China ini memiliki konsekuensi besar bagi ekonomi global. Dibebaskan oleh dan terkena kekuatan globalisasi ekonomi, diyakini secara luas, China memulai dari awal dan menciptakan sesuatu yang sangat baru untuk dirinya sendiri, untuk Asia, dan mungkin untuk dunia (Katzenstein, 2008).

Sejak 'Reformasi dan Keterbukaan' pada akhir 1970 an, Cina telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Hal ini telah memberi China blok bangunan untuk meningkatkan kekuatan ekonomi, militer, dan politiknya dibandingkan dengan negara lain, dan pada gilirannya meningkatkan kapasitasnya untuk membentuk dan mempengaruhi lingkungan internasional yang menguntungkannya. Bagaimana China akan menggunakan kekuatan ini adalah salah satu pertanyaan terpenting dalam hubungan internasional saat ini (Norton, 2015).

Pendekatan diplomasi China dikemas dengan baik oleh konsep pembangunan damai. Pembangunan Damai China menyatakan bahwa "tujuan keseluruhan China dalam mengejar pembangunan damai adalah untuk mempromosikan pembangunan dan harmoni di dalam negeri dan mengejar kerja sama dan perdamaian internasional". China berupaya untuk mempertahankan lingkungan internasional yang stabil, terutama di negara tetangga, yang kondusif bagi perkembangan ekonominya sehingga dapat meningkatkan kekayaan dan pengaruhnya, tetapi pada saat yang sama

meyakinkan tetangganya bahwa ia memiliki niat yang baik dan bukan merupakan ancaman. Ini dapat meredam dinamika dilema keamanan dan potensi penyeimbangan atau penahanan China. Ini akan mendukung stabilitas domestik, dan memungkinkan para pemimpinnya untuk berkonsentrasi pada tantangan dan prioritas domestik. China juga berusaha untuk melawan apa yang mereka anggap sebagai pengaruh AS yang berlebihan di sekitar pinggirannya sehingga dapat membentuk lingkungan keamanannya sendiri, sambil menghindari konflik terbuka dengan AS (Norton, 2015).

Prakarsa kebijakan China yang paling penting adalah Silk Road Economic Belt dan 21st century Maritime Silk Road (Belt and Road Inisiatif), dimana Xi berupaya untuk mempromosikan takdir bersama dengan memenuhi kebutuhan pembangunan China dan negara-negara tetangga di sepanjang jalur. Inisiatif sabuk jalan ini bertujuan untuk membangun konektivitas antara Asia, Eropa dan Afrika melauti darat dan laut dengan menyelaraskan dan mengkoordinasikan strategi pembangunan negara-negara di sepanjang jalur. Ini akan meningkatkan konektivitas, memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih besar dan membangun jaringan Kawasan perdagangan bebas sehingga menciptakan permintaan dan lapangan pekerjaan. Sebagian besar investasi ini akan didanai oleh Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) China yang baru berkembang (Norton, 2015).

Reformasi ekonomi yang diprakarsai oleh Deng Xiaoping menjadi momentum pergeseran bertahap dari ekonomi murni sosialis menjadi apa yang diklaim sebagai “sosialisme berciri Tionghoa”. Sejak reformasi ini, Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di antara negara-negara Asia lainnya, yang menunjukkan pertumbuhan PDB tertinggi mencapai lebih dari 15% pada tahun 1984 dan terendah 3,8% pada tahun 1990. Globalisasi dan perdagangan bebas telah membawa peluang besar untuk memperluas pasar dan investasi. China telah berhasil memanfaatkan peluang ini

untuk meningkatkan ekspansi dan leverage ekonominya. Di sisi lain, China harus menghadapi masalah domestik terkait seperti polusi udara yang parah dan pertumbuhan ekonomi yang lambat dalam beberapa tahun terakhir (sekitar 6-7%). Masalah ini juga menjadi faktor penting untuk memahami kebijakan ekonomi China dalam mendorong arus keluar investasi asing serta ekspansi ekspor (Fatmasari, 2017)

Tiongkok terus memperkuat pengaruhnya di seluruh dunia bukan hanya dengan menonjolkan kekuatan Angkatan lautnya atau dengan membuat pulau-pulau palsu di laut Tiongkok Selatan tetapi juga kekuatan ekonomi melalui perdagangan dan sekarang dengan pembentukan AIIB. Tujuan pembentukan AIIB adalah mendukung konektivitas, integritas, dan meningkatkan perekonomian secara keseluruhan serta meningkatkan daya saing negara-negara di Asia. Tujuan lainnya adalah untuk memenuhi kesenjangan dalam pembiayaan infrastruktur yang tidak dapat dipenuhi oleh bank multilateral (Wangke, 2015).

Mengembangkan hubungan bertetangga yang kooperatif dan harmonis sangatlah penting bagi strategi China. Hubungan China dengan negara tetangganya, telah mengalami perubahan yang signifikan. Cina telah menjadi pasar terbesar untuk sebagian besar ekonomi tetangganya, dan sumber investasi asing langsung (FDI) yang semakin penting mengalir bagi mereka. China dan ekonomi tetangganya terhubung oleh jaringan produksi yang didukung oleh investasi dan arus perdagangan (Yunling & Yuzhu).

BRI memberikan peluang baru bagi China dan ASEAN untuk memperdalam kerja sama ekonomi. BRI dianggap sebagai jenis kerjasama pembangunan baru berdasarkan prinsip-prinsip bersama, merancang, membangun, dan berbagi manfaat. Prioritas BRI adalah: (1) Koordinasi kebijakan melalui koordinasi strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi, menyusun rencana dan langkah, dan memberikan dukungan kebijakan untuk pelaksanaannya di

antara para mitra; (2) Konektivitas melalui pembangunan jaringan infrastruktur dengan juga mengintegrasikan rencana konstruksi dan sistem standar teknis; (3) Promosi perdagangan dan investasi melalui peningkatan investasi dan fasilitasi perdagangan, dan menghilangkan hambatan investasi dan perdagangan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat; (4) Kerja sama keuangan melalui pembangunan sistem stabilitas mata uang, sistem investasi dan pembiayaan, sistem informasi perkreditan, dan sistem pertukaran dan penyelesaian mata uang, pengembangan pasar obligasi, pembentukan lembaga keuangan baru, seperti Bank Investasi Infrastruktur Asia dan Silk Road Fund; (5) Pertukaran orang dengan mempromosikan pertukaran budaya dan akademik, pertukaran dan kerja sama personel, kerja sama media, pertukaran pemuda dan wanita, dan layanan sukarela, untuk memenangkan dukungan publik. Dengan bekerja sama, China dan ASEAN akan mengembangkan kawasan ekonomi baru yang dinamis (Yunling & Yuzhu).

Ada banyak motivasi bagi China untuk berinvestasi dalam infrastruktur di seluruh Asia. Pertama, inisiatif One Belt One Road menawarkan kesepakatan bisnis kepada perusahaan China untuk berinvestasi di luar negeri. Hasilnya, dapat mengeksport pengetahuan dalam pembangunan infrastruktur, dan menjual kelebihan kapasitasnya di beberapa industri, seperti di sektor konstruksi, ke luar negeri. Kedua, proyek tersebut dapat menghubungkan industri di wilayah barat China dan membawa pertumbuhan ekonomi ke wilayah yang kurang berkembang ini di China bagian barat. Ketiga, dan yang lebih penting untuk kasus yang akan saya fokuskan di sini, ini akan membantu negara-negara tetangga Asia untuk meningkatkan dan memodernisasi infrastruktur mereka. Dengan membantu mereka, China mampu mengintegrasikan kawasan tersebut secara ekonomi dengan China. Menghubungkan negara-negara Asia dengan China melalui kereta api dan pelabuhan akan meningkatkan perdagangan dan pembangunan untuk kedua belah pihak. Konektivitas yang lebih baik dapat memasok bahan mentah yang diperlukan untuk industri China dan

bermanfaat bagi negara lain untuk melakukan industrialisasi. Bersama-sama, ini membentuk satu cara bagi China untuk mengejar Impian China-nya. Impian Tiongkok diciptakan oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2013. Tujuan Tiongkok adalah untuk muncul sebagai pemimpin global. Pengaruh politik dan integrasi ekonomi akan membantu China untuk mencapai tujuan ini. Alih-alih mengikuti aturan dan norma internasional, ia pada akhirnya ingin membentuk lembaga internasional itu sendiri. Inisiatif One Belt One Road memberi China kesempatan untuk memberikan dirinya posisi sentral di Asia dan dunia, karena banyak negara Asia melihat China untuk peluang ekonomi. Sama seperti itu memiliki posisi penting di masa lalu dengan Jalur Sutra kuno (Heuvel, 2018).

Sejak krisis keuangan 2008, China telah menjadi penyedia aktif investasi langsung asing (FDI). Dari tahun 2012 hingga 2014, China telah menjadi investor terbesar ketiga di dunia, hanya di belakang AS dan Jepang. Di Asia-Pasifik, China adalah penyedia FDI nomor satu untuk Myanmar, Mongolia, Kamboja, Laos, dan Korea Utara, serta sumber utama FDI untuk Kazakhstan, Pakistan, Vietnam, Indonesia, Australia, Malaysia, dan lain-lain. Tidak seperti investor AS dan Jepang yang fokus pada manufaktur, sebagian besar investasi China terkonsentrasi pada energi, bahan mentah, dan infrastruktur. Namun, karena biaya tenaga kerja dan harga tanah naik, China telah mulai lebih banyak memindahkan basis manufakturnya ke negara-negara tetangga, seperti Vietnam, Indonesia, Bangladesh, India, dll. Karena FDI secara langsung menghasilkan peluang untuk pertumbuhan ekonomi. (Berger, 2019).

Investasi di infrastruktur Indonesia diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonominya. Namun, iklim investasinya yang buruk menghalangi investor untuk berinvestasi dalam proyek-proyek Indonesia. Meskipun demikian, sebagai bagian dari inisiatif One Belt One Road, China meningkatkan investasinya di Indonesia. Menurut Bank Dunia, Indonesia berada di peringkat 63 dalam laporan logistik

tahun 2016. Menurut Kamar Dagang Amerika di Indonesia, mahalnya biaya logistik menjadi faktor pembatas produksi di Indonesia. Bagi China, tampaknya akan bersaing dengan Jepang untuk memberikan proyek infrastruktur terbaik di kawasan, bagi Indonesia adalah pilihan di antara dua kandidat yang bersaing untuk meningkatkan infrastruktur dan meningkatkan ekonominya (Heuvel, 2018).

Indonesia adalah negara Asia Tenggara yang tumbuh pesat secara ekonomi. Ekonominya telah tumbuh kira-kira antara 5 dan 6 persen per tahun sejak 2010. Menurut Piketty, perkembangan ekonomi akhir-akhir ini di negara berkembang, seperti Indonesia, dimungkinkan oleh kemampuan mereka untuk berinvestasi sendiri daripada investasi dari pihak ketiga. Namun, infrastruktur yang buruk di Indonesia membatasi pertumbuhan masa depan di negara ini. Oleh karena itu, investasi di bidang infrastruktur merupakan kunci pertumbuhan di masa depan, pemerintah Indonesia harus berfokus pada peningkatan infrastruktur melalui beberapa program keuangan. Namun, Indonesia memiliki sumber daya yang terbatas untuk membiayai rencana investasi infrastrukturnya dan sedang mencari bantuan dari luar negeri. Di antara pemodal adalah bank investasi Cina, seperti Bank Infrastruktur dan Investasi Asia (AIIB) dan *China Road and Bridge Corporation* (CRBC). Karena Indonesia sangat membutuhkan investasi infrastruktur, dan kemungkinan keuangannya sendiri terbatas, pinjaman dari 20 lembaga internasional dapat membantu. Namun, mereka juga bisa menimbulkan risiko. Risiko yang mungkin terjadi adalah kewajiban keuangan dan kehilangan kedaulatannya dalam proses pengambilan keputusan (Heuvel, 2018).

Menurut World Economic Forum, Indonesia menempati urutan ke 64 dalam kualitas jalan. Kualitas infrastruktur perkeretaapian berada di peringkat 30 th dan infrastruktur pelabuhan berada di peringkat 72. Terutama infrastruktur pelabuhannya yang mencolok untuk negara kepulauan seperti Indonesia. Indonesia menempati urutan

keempat dengan subunit terbanyak dibandingkan dengan negara tetangga terkait tersebut, setelah Thailand. Hanya infrastruktur perkeretaapian Indonesia yang memenuhi syarat dengan relatif baik (Heuvel, 2018).

Cina adalah aktor kunci dalam panggung ekonomi regional dan politik regional. Bagi Indonesia, China sejauh ini merupakan mitra impor dan ekspor terbesar. Cina menyumbang lebih dari 20 persen dari impor dan ekspor Indonesia. Angka perdagangan ini telah berkembang pesat dalam dua dekade terakhir. Akibatnya, China tidak hanya menjadi aktor ekonomi utama tetapi juga aktor politik dan strategis yang penting di Indonesia, seperti halnya di negara-negara ASEAN lainnya. Selain itu, China terus mengambil alih posisi kepemimpinan AS di Asia Tenggara. Dia mencatat bahwa beberapa negara di kawasan ini sekarang terlibat dalam rantai pasokan Tiongkok. Dan negara-negara Asia Tenggara menyambut baik sejumlah besar investasi China (Heuvel, 2018).

Strategi penting yang dilakukan China adalah memperbesar volume perdagangan untuk kepentingan dalam negerinya. Sehingga dengan meningkatkan volume perdagangan ke berbagai macam negara berarti investasi dalam negerinya mengalami peningkatan dan juga memberikan lapangan kerja ke domestiknya. Pada akhirnya dampak dari semua investasi China ke berbagai negara termasuk ASEAN tentu mengutamakan kepentingan domestiknya. Hal itu akhirnya menimbulkan polemik di negara-negara tujuan investasi (VOA Indonesia, 2020).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana Strategi Hegemoni Ekonomi Politik China Melalui Investasi Asing di Indonesia”

C. Kerangka Teori

Perkembangan ekonomi perdagangan Indonesia dan China banyak mengalami pasang surut. Naik turun hubungan ekonomi dagang kedua negara karena di pengaruhi beberapa permasalahan seperti factor sosial ekonomi dan politik. Sejak negara China mengubah haluan menjadi negara terbuka maka Indonesia mempunyai kepentingan ekonomi, investasi dan perdagangan dengan negara China. Jalinan ekonomi dan perdagangan ini kemudian diimplementasikan melalui bentuk kerjasama ekonomi baik bilateral maupun regional. Salah satu diantaranya adalah kerjasama regional Asean dengan China. Tentu saja perkembangan China yang sangat pesat saat ini menjadi peluang dan tantangankhususnya bagi Indonesia dan negara-negara Asean lainnya.

Peningkatan investasi China ke Indonesia akan dapat dicapai karena Indonesia mempunyai berbagai keunggulan, antara lain stabilitas ekonomi relatif baik. Demikian Pemerintahan yang relatif stabil, termasuk masalah sosial dan politik cukup kondusif, yang berarti risk country Indonesia terus menurun. Kekuatan utama lainnya adalah bahwa Indonesia mempunyai sumber-sumber daya alam termasuk sumber energi yang melimpah seperti batubara, minyak dan gas bumi. Demikian juga sumber daya manusia yang banyak dan relatif murah. Dengan berbagai peluang ini tentu investor China akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Konsep *Soft Diplomacy* sendiri menjadi perhatian khusus bagi berbagai media dan publikasi di RRT sejak banyaknya wacana bahwa RRT telah memulai untuk memperhatikan *Soft Diplomacy*nya. Tetapi, yang menjadi pertanyaan oleh berbagai ilmuwan di RRT saat ini ialah sejauh

mana kapasitas RRT dalam mengaplikasikan *Soft Diplomacy*nya dan bagaimana mereka mengaplikasikannya.

a) **Soft Power Ekonomi**

Berdasarkan sejarah, konsep *Soft Diplomacy* di RRT bermula pada dekade awal di abad 21 ini tepatnya bermula pada tahun 1993 ketika Wang Huning, salah satu anggota dari Partai Komunis Cina dan Kepala Bagian Penelitian dan Kebijakan, memperkenalkan teori yang diperkenalkan oleh Joseph Nye ke RRT. Pada tahun 1992 ketika RRT mulai menyadari bahwa adanya infiltrasi yang dilakukan oleh pihak Amerika Serikat dalam bentuk infiltrasi ideologi melalui “Paham Amerika” atau “Nilai-Nilai” berbasis Amerika. Paham tersebut dipercaya menyaingi “Nilai-Nilai” yang dianut oleh RRT dalam beberapa dekade terakhir.

Nilai yang dimaksud oleh Wang Huning yaitu nilai tradisional Konfusius yang merupakan pedoman dasar masyarakat RRT dalam menjalani kehidupan sehari-harinya termasuk dalam kehidupan berkeluarga ataupun kehidupan dalam politik dan pemerintahan. Penggunaan *Soft Diplomacy* dalam interaksinya dengan negara lain dipercaya karena adanya kesadaran rakyat maupun pemerintah RRT untuk mewujudkan kembali kepercayaan Konfusius bahwa setiap orang Tiongkok dapat menjadi orang yang budiman, tahu aturan dan santun serta dapat menciptakan suasana pemerintahan yang baik.

Pemahaman Konfusius kemudian menjadi landasan dari *Soft Diplomacy* RRT dan yang juga mendorong munculnya *Peaceful Rise* yang mengutamakan kebijakan yang tidak menciptakan konflik dan mendorong terbangunnya kebudayaan RRT.

Dalam konteks soft power Tiongkok, kebijakannya terlihat akomodatif, partisipatif dalam organisasi regional, ia juga kerap memberikan bantuan asing ke negara-negara

mitranya dengan jumlah yang tidak sedikit, terlebih hubungan ekonomi Tiongkok dengan para mitranya dianggap banyak memberikan manfaat. Sehingga muncul pandangan bahwa meningkatnya soft power Tiongkok di dunia adalah usahanya untuk menjadi masyarakat internasional yang bertanggung jawab dan bermanfaat nyata melalui bantuan, perdagangan dan investasi.

Dalam buku Joseph Nye, ekonomi justru tidak termasuk dalam soft power karena lebih cenderung ke hard power. Namun muncul pertanyaan, jika negara A memberikan bantuan ekonomi ke negara B tanpa meminta imbalan apapun secara eksplisit atau implisit, apakah itu soft power atau hard power?. Meskipun ekonomi penting bagi hard power, di saat yang sama pertumbuhan ekonomi yang cepat dan sukses dapat menginspirasi persaingan model pembangunan suatu negara. Dan juga, hubungan perdagangan, dan investasi yang mendalam dapat mempromosikan keterikatan yang efektif sehingga dapat memfasilitasi soft power. Bantuan ekonomi untuk negara-negara dunia ketiga dapat menjadi sumber soft power yang normatif. Yang dimaksud normatif ialah negara lain menganggap kebijakan dan peran internasional sebagai hal yang sah dan dapat dibenarkan (Yulianti & Affandi, 2018).

b) Konsep Foreign Direct Investment (FDI)

Penanaman modal asing atau biasa disebut Foreign Direct Investment (FDI) merupakan hal yang mendasar dan penting bagi proses pembangunan ekonomi suatu negara. FDI yang diartikan sebagai investasi dalam bentuk asset tetap yang berlokasi diluar negeri guna mengoperasikan proses distribusi dan atau fasilitas Produksi. Odd Shenkar mendefinisikan FDI sebagai suatu kondisi ketika suatu perusahaan menginvestasikan secara langsung pada bidang produksi atau pada fasilitas lain di negara lain dengan tanpa kehilangan kontrol efektif perusahaan tersebut.

Menurut Krugman (1994) yang dimaksud dengan FDI adalah arus modal internasional dimana perusahaan dari

suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Oleh karena itu tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan control terhadap perusahaan di luar negeri. FDI merupakan salah satu jalan yang umum ditempuh dalam rangka globalisasi dan internasionalisasi suatu perusahaan tersebut. Dalam konsepsi FDI terdapat adanya konsep *host country* atau negara asal perusahaan yang menanamkan FDI dan *home country* yang menjadi tujuan dimana perusahaan melakukan kegiatan industrinya. Dalam hal proses masuk dan keluarnya FDI terdapat istilah *outflow of FDI* dan *inflow of FDI*. *Outflow of FDI* merupakan proses masuknya perusahaan dari negara asing untuk berinvestasi di suatu negara tujuan atau *host country*.

Salah satu proyek yang paling besar dan sekaligus kontroversial secara politik di Indonesia yang dibiayai oleh China adalah rencana rel kecepatan tinggi dari Jakarta ke Bandung. Yu (2014) adalah salah satu dari sedikit sarjana yang menganalisis pertempuran kereta api berkecepatan tinggi antara Jepang dan Cina, dan secara lebih umum upaya pembangunan infrastruktur di Asia Tenggara. Alasan China ingin mengeksport teknologi rel berkecepatan tinggi didasarkan pada upaya mereka untuk mempromosikan dan meningkatkan kekuatan ekonomi dan diplomatiknya di kawasan dengan berlandaskan:

Pertama, cara mengejar pengaruhnya di daerah sebagai bagian dari kepentingan nasional mereka. Ini menawarkan proyek perusahaan infrastruktur China untuk menumbuhkan bisnisnya di luar negeri dan mempromosikan industri bernilai tambah tinggi untuk berkembang. Dan kedua, kerja sama ekonomi antara China dan negara-negara di Asia Tenggara adalah cara untuk menunjukkan bahwa kebangkitan China secara damai adalah mungkin, terlepas dari sengketa teritorial, terutama di Laut China Selatan, yang dimiliki China dengan negara-negara tetangga (Yunling & Yuzhu).

Selain itu, membangun kereta api berkecepatan tinggi juga menunjukkan kemajuan Tiongkok dari produksi padat karya menjadi produksi berteknologi tinggi. Ini adalah cara untuk mengejar pengaruhnya di kawasan sebagai bagian dari kepentingan nasional mereka. Ini menawarkan proyek perusahaan infrastruktur. Namun, upaya China untuk menghubungkan Asia Tenggara dengan jalur kereta api berkecepatan tinggi, kadang-kadang disebut diplomasi kereta api China.

D. Hipotesa

Dari kerangka berpikir di atas dapat ditarik hipotesa, bahwa China sebagai raksasa baru di regional Asia bahkan global menjadikan Asia Tenggara atau ASEAN sebagai pasar untuk produk-produk dan jasa negara khususnya Indonesia.

China berupaya mengejar pengaruh kekuatan politik dan ekonominya di daerah negara tetangga khususnya Indonesia guna menjadi pemimpin ekonomi di Kawasan ekonomi regional ASEAN.

E. Metodologi Penelitian

a) Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang suatu waktu tertentu.

Adapun pendekatan terhadap penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, mengumpulkan data yang spesifik dari

para partisipan, menganalisis data secara induktif dan kemudian memberikan interpretasi mengenai makna dari data yang diperoleh (Bakry, 2017, hal. 14-15).

b) Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Data sekunder ini bertujuan untuk menggambarkan berbagai praktik analisis dengan menggunakan data yang sudah ada, baik data yang dikumpulkan oleh peneliti lain maupun yang dikumpulkan oleh instansi-instansi pemerintah, baik untuk meneliti pertanyaan penelitian baru maupun untuk meneliti kembali pertanyaan penelitian utama (yang asli) untuk keperluan pembuktian (Bakry, 2017). Pada umumnya data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip atau dokumen yang dipublikasikan ataupun yang tidak dipublikasikan. Bentuk data yang diperoleh dari penelitian ini meliputi buku, artikel, jurnal-jurnal, surat kabar serta media lainnya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat 4 bab sebagai garis besar mengenai topik skripsi. Sedangkan terdapat sub bab yang akan memperjelas atau berisi detail dari garis besar bab-bab yang sebelumnya sudah dibuat atau ditulis. Hubungan antar bab yang sistematis dan berkaitan satu sama lain akan mempermudah bagi pembaca dalam memahami isi skripsi dan juga sesuai dengan karya tulis ilmiah yang sistematis.

BAB	PENJELASAN
I	Berisi tentang pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, metodologi, batasan penelitian dan sistematika penulisan.
II	Bab ini akan berisi tentang kerjasama ekonomi antara China dan Indonesia. Selanjutnya akan dibahas juga

	berbagai perjanjian-perjanjian yang sudah terjalin antara kedua pihak.
III	Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang strategi investasi asing Tiongkok dalam membangun pengaruh di Kawasan ASEAN serta menerapkan aplikasi teori yang dipakai oleh penulis dalam menganalisis hegemoni politik ekonomi China di Indonesia.
IV	Berisi tentang kesimpulan dari skripsi yang berupa rangkuman dari BAB I sampai BAB III dan sub bab yang sudah dijelaskan.

BAB I

PENDAHULUAN

G. Latar Belakang Masalah

Globalisasi ekonomi dan reformasi domestik telah menempatkan China pada jalur yang ditandai dengan tingkat pertumbuhan tahunan yang bervariasi antara 8 dan 10 persen, dan arus masuk investasi asing langsung tahunan rata-rata mencapai \$35-50 miliar selama dekade terakhir. Perubahan ukuran ekonomi China ini memiliki konsekuensi besar bagi ekonomi global. Dibebaskan oleh dan terkena kekuatan globalisasi ekonomi, diyakini secara luas, China memulai dari awal dan menciptakan sesuatu yang sangat baru untuk dirinya sendiri, untuk Asia, dan mungkin untuk dunia (Katzenstein, 2008).

Sejak 'Reformasi dan Keterbukaan' pada akhir 1970 an, Cina telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Hal ini telah memberi China blok bangunan untuk meningkatkan kekuatan ekonomi, militer, dan politiknya dibandingkan dengan negara lain, dan pada gilirannya meningkatkan kapasitasnya untuk membentuk dan mempengaruhi lingkungan internasional yang menguntungkannya. Bagaimana China akan menggunakan kekuatan ini adalah salah satu pertanyaan terpenting dalam hubungan internasional saat ini (Norton, 2015).

Pendekatan diplomasi China dikemas dengan baik oleh konsep pembangunan damai. Pembangunan Damai China menyatakan bahwa "tujuan keseluruhan China dalam mengejar pembangunan damai adalah untuk mempromosikan pembangunan dan harmoni di dalam negeri dan mengejar kerja sama dan perdamaian internasional". China berupaya untuk mempertahankan lingkungan internasional yang stabil, terutama di negara tetangga, yang kondusif bagi perkembangan ekonominya sehingga dapat meningkatkan

kekayaan dan pengaruhnya, tetapi pada saat yang sama meyakinkan tetangganya bahwa ia memiliki niat yang baik dan bukan merupakan ancaman. Ini dapat meredam dinamika dilema keamanan dan potensi penyeimbangan atau penahanan China. Ini akan mendukung stabilitas domestik, dan memungkinkan para pemimpinnya untuk berkonsentrasi pada tantangan dan prioritas domestik. China juga berusaha untuk melawan apa yang mereka anggap sebagai pengaruh AS yang berlebihan di sekitar pinggirannya sehingga dapat membentuk lingkungan keamanannya sendiri, sambil menghindari konflik terbuka dengan AS (Norton, 2015).

Prakarsa kebijakan China yang paling penting adalah Silk Road Economic Belt dan 21st century Maritime Silk Road (Belt and Road Inisiatif), dimana Xi berupaya untuk mempromosikan takdir bersama dengan memenuhi kebutuhan pembangunan China dan negara-negara tetangga di sepanjang jalur. Inisiatif sabuk jalan ini bertujuan untuk membangun konektivitas antara Asia, Eropa dan Afrika memlauti darat dan laut dengan menyelaraskan dan mengkoordinasikan strategi pembangunan negara-negara di sepanjang jalur. Ini akan meningkatkan konektivitas, memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih besar dan membangun jaringan Kawasan perdagangan bebas sehingga menciptakan permintaan dan lapangan pekerjaan. Sebagian besar investasi ini akan didanai oleh Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) China yang baru berkembang (Norton, 2015).

Reformasi ekonomi yang diprakarsai oleh Deng Xiaoping menjadi momentum pergeseran bertahap dari ekonomi murni sosialis menjadi apa yang diklaim sebagai “sosialisme berciri Tionghoa”. Sejak reformasi ini, Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di antara negara-negara Asia lainnya, yang menunjukkan pertumbuhan PDB tertinggi mencapai lebih dari 15% pada tahun 1984 dan terendah 3,8% pada tahun 1990. Globalisasi dan perdagangan bebas telah membawa peluang besar untuk memperluas pasar

dan investasi. China telah berhasil memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan ekspansi dan leverage ekonominya. Di sisi lain, China harus menghadapi masalah domestik terkait seperti polusi udara yang parah dan pertumbuhan ekonomi yang lambat dalam beberapa tahun terakhir (sekitar 6-7%). Masalah ini juga menjadi faktor penting untuk memahami kebijakan ekonomi China dalam mendorong arus keluar investasi asing serta ekspansi ekspor (Fatmasari, 2017)

Tiongkok terus memperkuat pengaruhnya di seluruh dunia bukan hanya dengan menonjolkan kekuatan Angkatan lautnya atau dengan membuat pulau-pulau palsu di laut Tiongkok Selatan tetapi juga kekuatan ekonomi melalui perdagangan dan sekarang dengan pembentukan AIIB. Tujuan pembentukan AIIB adalah mendukung konektivitas, integritas, dan meningkatkan perekonomian secara keseluruhan serta meningkatkan daya saing negara-negara di Asia. Tujuan lainnya adalah untuk memenuhi kesenjangan dalam pembiayaan infrastruktur yang tidak dapat dipenuhi oleh bank multilateral (Wangke, 2015).

Mengembangkan hubungan bertetangga yang kooperatif dan harmonis sangatlah penting bagi strategi China. Hubungan China dengan negara tetangganya, telah mengalami perubahan yang signifikan. Cina telah menjadi pasar terbesar untuk sebagian besar ekonomi tetangganya, dan sumber investasi asing langsung (FDI) yang semakin penting mengalir bagi mereka. China dan ekonomi tetangganya terhubung oleh jaringan produksi yang didukung oleh investasi dan arus perdagangan (Yunling & Yuzhu).

BRI memberikan peluang baru bagi China dan ASEAN untuk memperdalam kerja sama ekonomi. BRI dianggap sebagai jenis kerjasama pembangunan baru berdasarkan prinsip-prinsip bersama, merancang, membangun, dan berbagi manfaat. Prioritas BRI adalah: (1) Koordinasi kebijakan melalui koordinasi strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi, menyusun rencana dan langkah, dan

memberikan dukungan kebijakan untuk pelaksanaannya di antara para mitra; (2) Konektivitas melalui pembangunan jaringan infrastruktur dengan juga mengintegrasikan rencana konstruksi dan sistem standar teknis; (3) Promosi perdagangan dan investasi melalui peningkatan investasi dan fasilitasi perdagangan, dan menghilangkan hambatan investasi dan perdagangan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat; (4) Kerja sama keuangan melalui pembangunan sistem stabilitas mata uang, sistem investasi dan pembiayaan, sistem informasi perkreditan, dan sistem pertukaran dan penyelesaian mata uang, pengembangan pasar obligasi, pembentukan lembaga keuangan baru, seperti Bank Investasi Infrastruktur Asia dan Silk Road Fund; (5) Pertukaran orang dengan mempromosikan pertukaran budaya dan akademik, pertukaran dan kerja sama personel, kerja sama media, pertukaran pemuda dan wanita, dan layanan sukarela, untuk memenangkan dukungan publik. Dengan bekerja sama, China dan ASEAN akan mengembangkan kawasan ekonomi baru yang dinamis (Yunling & Yuzhu).

Ada banyak motivasi bagi China untuk berinvestasi dalam infrastruktur di seluruh Asia. Pertama, inisiatif One Belt One Road menawarkan kesepakatan bisnis kepada perusahaan China untuk berinvestasi di luar negeri. Hasilnya, dapat mengeksport pengetahuan dalam pembangunan infrastruktur, dan menjual kelebihan kapasitasnya di beberapa industri, seperti di sektor konstruksi, ke luar negeri. Kedua, proyek tersebut dapat menghubungkan industri di wilayah barat China dan membawa pertumbuhan ekonomi ke wilayah yang kurang berkembang ini di China bagian barat. Ketiga, dan yang lebih penting untuk kasus yang akan saya fokuskan di sini, ini akan membantu negara-negara tetangga Asia untuk meningkatkan dan memodernisasi infrastruktur mereka. Dengan membantu mereka, China mampu mengintegrasikan kawasan tersebut secara ekonomi dengan China. Menghubungkan negara-negara Asia dengan China melalui kereta api dan pelabuhan akan meningkatkan perdagangan dan pembangunan untuk kedua

belah pihak. Konektivitas yang lebih baik dapat memasok bahan mentah yang diperlukan untuk industri China dan bermanfaat bagi negara lain untuk melakukan industrialisasi. Bersama-sama, ini membentuk satu cara bagi China untuk mengejar Impian China-nya. Impian Tiongkok diciptakan oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2013. Tujuan Tiongkok adalah untuk muncul sebagai pemimpin global. Pengaruh politik dan integrasi ekonomi akan membantu China untuk mencapai tujuan ini. Alih-alih mengikuti aturan dan norma internasional, ia pada akhirnya ingin membentuk lembaga internasional itu sendiri. Inisiatif One Belt One Road memberi China kesempatan untuk memberikan dirinya posisi sentral di Asia dan dunia, karena banyak negara Asia melihat China untuk peluang ekonomi. Sama seperti itu memiliki posisi penting di masa lalu dengan Jalur Sutra kuno (Heuvel, 2018).

Sejak krisis keuangan 2008, China telah menjadi penyedia aktif investasi langsung asing (FDI). Dari tahun 2012 hingga 2014, China telah menjadi investor terbesar ketiga di dunia, hanya di belakang AS dan Jepang. Di Asia-Pasifik, China adalah penyedia FDI nomor satu untuk Myanmar, Mongolia, Kamboja, Laos, dan Korea Utara, serta sumber utama FDI untuk Kazakhstan, Pakistan, Vietnam, Indonesia, Australia, Malaysia, dan lain-lain. Tidak seperti investor AS dan Jepang yang fokus pada manufaktur, sebagian besar investasi China terkonsentrasi pada energi, bahan mentah, dan infrastruktur. Namun, karena biaya tenaga kerja dan harga tanah naik, China telah mulai lebih banyak memindahkan basis manufakturnya ke negara-negara tetangga, seperti Vietnam, Indonesia, Bangladesh, India, dll. Karena FDI secara langsung menghasilkan peluang untuk pertumbuhan ekonomi. (Berger, 2019).

Investasi di infrastruktur Indonesia diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonominya. Namun, iklim investasinya yang buruk menghalangi investor untuk berinvestasi dalam proyek-proyek Indonesia. Meskipun demikian, sebagai bagian dari inisiatif One Belt One Road,

China meningkatkan investasinya di Indonesia. Menurut Bank Dunia, Indonesia berada di peringkat 63 dalam laporan logistik tahun 2016. Menurut Kamar Dagang Amerika di Indonesia, mahalnya biaya logistik menjadi faktor pembatas produksi di Indonesia. Bagi China, tampaknya akan bersaing dengan Jepang untuk memberikan proyek infrastruktur terbaik di kawasan, bagi Indonesia adalah pilihan di antara dua kandidat yang bersaing untuk meningkatkan infrastruktur dan meningkatkan ekonominya (Heuvel, 2018).

Indonesia adalah negara Asia Tenggara yang tumbuh pesat secara ekonomi. Ekonominya telah tumbuh kira-kira antara 5 dan 6 persen per tahun sejak 2010. Menurut Piketty, perkembangan ekonomi akhir-akhir ini di negara berkembang, seperti Indonesia, dimungkinkan oleh kemampuan mereka untuk berinvestasi sendiri daripada investasi dari pihak ketiga. Namun, infrastruktur yang buruk di Indonesia membatasi pertumbuhan masa depan di negara ini. Oleh karena itu, investasi di bidang infrastruktur merupakan kunci pertumbuhan di masa depan, pemerintah Indonesia harus berfokus pada peningkatan infrastruktur melalui beberapa program keuangan. Namun, Indonesia memiliki sumber daya yang terbatas untuk membiayai rencana investasi infrastrukturnya dan sedang mencari bantuan dari luar negeri. Di antara pemodal adalah bank investasi Cina, seperti Bank Infrastruktur dan Investasi Asia (AIIB) dan *China Road and Bridge Corporation* (CRBC). Karena Indonesia sangat membutuhkan investasi infrastruktur, dan kemungkinan keuangannya sendiri terbatas, pinjaman dari 20 lembaga internasional dapat membantu. Namun, mereka juga bisa menimbulkan risiko. Risiko yang mungkin terjadi adalah kewajiban keuangan dan kehilangan kedaulatannya dalam proses pengambilan keputusan (Heuvel, 2018).

Menurut World Economic Forum, Indonesia menempati urutan ke 64 dalam kualitas jalan. Kualitas infrastruktur perkeretaapian berada di peringkat 30 th dan infrastruktur pelabuhan berada di peringkat 72. Terutama

infrastruktur pelabuhannya yang mencolok untuk negara kepulauan seperti Indonesia. Indonesia menempati urutan keempat dengan subunit terbanyak dibandingkan dengan negara tetangga terkait tersebut, setelah Thailand. Hanya infrastruktur perkeretaapian Indonesia yang memenuhi syarat dengan relatif baik (Heuvel, 2018).

Cina adalah aktor kunci dalam panggung ekonomi regional dan politik regional. Bagi Indonesia, China sejauh ini merupakan mitra impor dan ekspor terbesar. Cina menyumbang lebih dari 20 persen dari impor dan ekspor Indonesia. Angka perdagangan ini telah berkembang pesat dalam dua dekade terakhir. Akibatnya, China tidak hanya menjadi aktor ekonomi utama tetapi juga aktor politik dan strategis yang penting di Indonesia, seperti halnya di negara-negara ASEAN lainnya. Selain itu, China terus mengambil alih posisi kepemimpinan AS di Asia Tenggara. Dia mencatat bahwa beberapa negara di kawasan ini sekarang terlibat dalam rantai pasokan Tiongkok. Dan negara-negara Asia Tenggara menyambut baik sejumlah besar investasi China (Heuvel, 2018).

Strategi penting yang dilakukan China adalah memperbesar volume perdagangan untuk kepentingan dalam negerinya. Sehingga dengan meningkatkan volume perdagangan ke berbagai macam negara berarti investasi dalam negerinya mengalami peningkatan dan juga memberikan lapangan kerja ke domestiknya. Pada akhirnya dampak dari semua investasi China ke berbagai negara termasuk ASEAN tentu mengutamakan kepentingan domestiknya. Hal itu akhirnya menimbulkan polemik di negara-negara tujuan investasi (VOA Indonesia, 2020).

H. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana Strategi Hegemoni Ekonomi Politik China Melalui Investasi Asing di Indonesia”

I. Kerangka Teori

Perkembangan ekonomi perdagangan Indonesia dan China banyak mengalami pasang surut. Naik turun hubungan ekonomi dagang kedua negara karena di pengaruhi beberapa permasalahan seperti factor sosial ekonomi dan politik. Sejak negara China mengubah haluan menjadi negara terbuka maka Indonesia mempunyai kepentingan ekonomi, investasi dan perdagangan dengan negara China. Jalinan ekonomi dan perdagangan ini kemudian diimplementasikan melalui bentuk kerjasama ekonomi baik bilateral maupun regional. Salah satu diantaranya adalah kerjasama regional Asean dengan China. Tentu saja perkembangan China yang sangat pesat saat ini menjadi peluang dan tantangankhususnya bagi Indonesia dan negara-negara Asean lainnya.

Peningkatan investasi China ke Indonesia akan dapat dicapai karena Indonesia mempunyai berbagai keunggulan, antara lain stabilitas ekonomi relatif baik. Demikian Pemerintahan yang relatif stabil, termasuk masalah sosial dan politik cukup kondusif, yang berarti risk country Indonesia terus menurun. Kekuatan utama lainnya adalah bahwa Indonesia mempunyai sumber-sumber daya alam termasuk sumber energi yang melimpah seperti batubara, minyak dan gas bumi. Demikian juga sumber daya manusia yang banyak dan relatif murah. Dengan berbagai peluang ini tentu investor China akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Konsep *Soft Diplomacy* sendiri menjadi perhatian khusus bagi berbagai media dan publikasi di RRT sejak banyaknya wacana bahwa RRT telah memulai untuk memperhatikan *Soft Diplomacynya*. Tetapi, yang menjadi pertanyaan oleh berbagai ilmuwan di RRT saat ini ialah sejauh

mana kapasitas RRT dalam mengaplikasikan *Soft Diplomacy*nya dan bagaimana mereka mengaplikasikannya.

c) **Soft Power Ekonomi**

Berdasarkan sejarah, konsep *Soft Diplomacy* di RRT bermula pada dekade awal di abad 21 ini tepatnya bermula pada tahun 1993 ketika Wang Huning, salah satu anggota dari Partai Komunis Cina dan Kepala Bagian Penelitian dan Kebijakan, memperkenalkan teori yang diperkenalkan oleh Joseph Nye ke RRT. Pada tahun 1992 ketika RRT mulai menyadari bahwa adanya infiltrasi yang dilakukan oleh pihak Amerika Serikat dalam bentuk infiltrasi ideologi melalui “Paham Amerika” atau “Nilai-Nilai” berbasis Amerika. Paham tersebut dipercaya menyaingi “Nilai-Nilai” yang dianut oleh RRT dalam beberapa dekade terakhir.

Nilai yang dimaksud oleh Wang Huning yaitu nilai tradisional Konfusius yang merupakan pedoman dasar masyarakat RRT dalam menjalani kehidupan sehari-harinya termasuk dalam kehidupan berkeluarga ataupun kehidupan dalam politik dan pemerintahan. Penggunaan *Soft Diplomacy* dalam interaksinya dengan negara lain dipercaya karena adanya kesadaran rakyat maupun pemerintah RRT untuk mewujudkan kembali kepercayaan Konfusius bahwa setiap orang tiongkok dapat menjadi orang yang budiman, tahu aturan dan santun serta dapat menciptakan suasana pemerintahan yang baik.

Pemahaman Konfusius kemudian menjadi landasan dari *Soft Diplomacy* RRT dan yang juga mendorong munculnya *Peaceful Rise* yang mengutamakan kebijakan yang tidak menciptakan konflik dan mendorong terbangunnya kebudayaan RRT.

Dalam konteks soft power Tiongkok, kebijakannya terlihat akomodatif, partisipatif dalam organisasi regional, ia juga kerap memberikan bantuan asing ke negara-negara

mitranya dengan jumlah yang tidak sedikit, terlebih hubungan ekonomi Tiongkok dengan para mitranya dianggap banyak memberikan manfaat. Sehingga muncul pandangan bahwa meningkatnya soft power Tiongkok di dunia adalah usahanya untuk menjadi masyarakat internasional yang bertanggung jawab dan bermanfaat nyata melalui bantuan, perdagangan dan investasi.

Dalam buku Joseph Nye, ekonomi justru tidak termasuk dalam soft power karena lebih cenderung ke hard power. Namun muncul pertanyaan, jika negara A memberikan bantuan ekonomi ke negara B tanpa meminta imbalan apapun secara eksplisit atau implisit, apakah itu soft power atau hard power?. Meskipun ekonomi penting bagi hard power, di saat yang sama pertumbuhan ekonomi yang cepat dan sukses dapat menginspirasi persaingan model pembangunan suatu negara. Dan juga, hubungan perdagangan, dan investasi yang mendalam dapat mempromosikan keterikatan yang efektif sehingga dapat memfasilitasi soft power. Bantuan ekonomi untuk negara-negara dunia ketiga dapat menjadi sumber soft power yang normatif. Yang dimaksud normatif ialah negara lain menganggap kebijakan dan peran internasional sebagai hal yang sah dan dapat dibenarkan (Yulianti & Affandi, 2018).

d) Konsep Foreign Direct Investment (FDI)

Penanaman modal asing atau biasa disebut Foreign Direct Investment (FDI) merupakan hal yang mendasar dan penting bagi proses pembangunan ekonomi suatu negara. FDI yang diartikan sebagai investasi dalam bentuk aset tetap yang berlokasi diluar negeri guna mengoperasikan proses distribusi dan atau fasilitas Produksi. Odd Shenkar mendefinisikan FDI sebagai suatu kondisi ketika suatu perusahaan menginvestasikan secara langsung pada bidang produksi atau pada fasilitas lain di negara lain dengan tanpa kehilangan kontrol efektif perusahaan tersebut.

Menurut Kruggman (1994) yang dimaksud dengan FDI adalah arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Oleh karena itu tdiak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan control terhadap perusahaan di luar negeri. FDI merupakan salah satu jalan yang umum ditempuh dalam rangka globalisasi dan internasionalisasi suatu perusahaan tersebut. Dalam konsepsi FDI terdapat adanya konsep *host country* atau negara asal perusahaan yang menanamkan FDI dan *home country* yang menjadi tujuan dimana perusahaan melakukan kegiatan industrinya. Dalam hal proses masuk dan keluarnya FDI terdapat istilah *outflow of FDI* dan *inflow of FDI*. *Outflow of FDI* merupakan proses Masuknya perusahaan dari negara asing untuk berinvestasi di suatu negara tujuan atau *host country*.

Salah satu proyek yang paling besar dan sekaligus kontroversial secara politik di Indonesia yang dibiayai oleh China adalah rencana rel kecepatan tinggi dari Jakarta ke Bandung. Yu (2014) adalah salah satu dari sedikit sarjana yang menganalisis pertempuran kereta api berkecepatan tinggi antara Jepang dan Cina, dan secara lebih umum upaya pembangunan infrastruktur di Asia Tenggara. Alasan China ingin mengekspor teknologi rel berkecepatan tinggi didasarkan pada upaya mereka untuk mempromosikan dan meningkatkan kekuatan ekonomi dan diplomatiknya di kawasan dengan berlandaskan:

Pertama, cara mengejar pengaruhnya di daerah sebagai bagian dari kepentingan nasional mereka. Ini menawarkan proyek perusahaan infrastruktur China untuk menumbuhkan bisnisnya di luar negeri dan mempromosikan industri bernilai tambah tinggi untuk berkembang. Dan kedua, kerja sama ekonomi antara China dan negara-negara di Asia Tenggara adalah cara untuk menunjukkan bahwa kebangkitan China secara damai adalah mungkin, terlepas dari sengketa

teritorial, terutama di Laut China Selatan, yang dimiliki China dengan negara-negara tetangga (Yunling & Yuzhu).

Selain itu, membangun kereta api berkecepatan tinggi juga menunjukkan kemajuan Tiongkok dari produksi padat karya menjadi produksi berteknologi tinggi. Ini adalah cara untuk mengejar pengaruhnya di kawasan sebagai bagian dari kepentingan nasional mereka. Ini menawarkan proyek perusahaan infrastruktur Namun, upaya China untuk menghubungkan Asia Tenggara dengan jalur kereta api berkecepatan tinggi, kadang-kadang disebut diplomasi kereta api China.

J. Hipotesa

Dari kerangka berpikir di atas dapat di tarik hipotesa, bahwa China sebagai raksasa baru di regional Asia bahkan global menjadikan Asia tenggara atau ASEAN sebagai pasar untuk produk-produk dan jasa negara khususnya Indonesia.

China berupaya mengejar pengaruh kekuatan politik dan ekonominya di daerah negara tetangga khususnya Indonesia guna menjadi pemimpin ekonomi di Kawasan ekonomi regional ASEAN.

K. Metodologi Penelitian

e) Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang suatu waktu tertentu.

Adapun pendekatan terhadap penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok

orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif dan kemudian memberikan interpretasi mengenai makna dari data yang diperoleh (Bakry, 2017, hal. 14-15).

f) Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Data sekunder ini bertujuan untuk menggambarkan berbagai praktik analisis dengan menggunakan data yang sudah ada, baik data yang dikumpulkan oleh peneliti lain maupun yang dikumpulkan oleh instansi-instansi pemerintah, baik untuk meneliti pertanyaan penelitian baru maupun untuk meneliti kembali pertanyaan penelitian utama (yang asli) untuk keperluan pembuktian (Bakry, 2017). Pada umumnya data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip atau dokumen yang dipublikasikan ataupun yang tidak dipublikasikan. Bentuk data yang diperoleh dari penelitian ini meliputi buku, artikel, jurnal-jurnal, surat kabar serta media lainnya.

L. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat 4 bab sebagai garis besar mengenai topik skripsi. Sedangkan terdapat sub bab yang akan memperjelas atau berisi detail dari garis besar bab-bab yang sebelumnya sudah dibuat atau ditulis. Hubungan antar bab yang sistematis dan berkaitan satu sama lain akan mempermudah bagi pembaca dalam memahami isi skripsi dan juga sesuai dengan karya tulis ilmiah yang sistematis.

BAB	PENJELASAN
I	Berisi tentang pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, metodologi, batasan penelitian dan

	sistematika penulisan.
II	Bab ini akan berisi tentang kerjasama ekonomi antara China dan Indonesia. Selanjutnya akan dibahas juga berbagai perjanjian-perjanjian yang sudah terjalin antara kedua pihak.
III	Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang strategi investasi asing Tiongkok dalam membangun pengaruh di Kawasan ASEAN serta menerapkan aplikasi teori yang dipakai oleh penulis dalam menganalisis hegemoni politik ekonomi China di Indonesia.
IV	Berisi tentang kesimpulan dari skripsi yang berupa rangkuman dari BAB I sampai BAB III dan sub bab yang sudah dijelaskan.

